

BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN IMIGRASI AMERIKA SERIKAT DI PERBATASAN EL PASO PADA ERA DONALD TRUMP

Perbatasan El Paso adalah salah satu perlintasan perbatasan Amerika Serikat-Meksiko yang ramai dan menjadi lokasi utama penerapan kebijakan imigrasi Donald Trump. Sebagai wujud nyata dari kampanye "*America First*" dan janjinya untuk meningkatkan keamanan perbatasan, El Paso mencerminkan kompleksitas masalah imigrasi, ketegangan diplomatik, dan pergulatan identitas nasional Amerika. Kebijakan kontroversial seperti pemisahan keluarga, protokol "*Remain in Mexico*", dan pembangunan tembok perbatasan tidak hanya mengubah tampilan fisik pada wilayah ini, tetapi juga berdampak besar pada aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya komunitas perbatasan. Dengan pendekatan penegakan hukum yang ketat, era Trump menghadirkan perubahan mendasar dalam penanganan imigrasi di Amerika Serikat, yang dampaknya masih terasa hingga kini di El Paso dan sekitarnya.

2.1 Kebijakan 'America First' dan Retorika Anti Imigrasi

Trump menjalankan kampanye presiden dengan slogan "*Make America Great Again*" (*MAGA*) yang berfokus pada beberapa hal yaitu Ekonomi nasionalis, Pembatasan imigrasi, kritik terhadap globalisasi, peninjauan ulang perjanjian perdagangan, dan penekanan pada keamanan perbatasan. Trump juga menjanjikan pembangunan tembok perbatasan di Meksiko untuk menekan angka migrasi. Dengan slogan '*America First*' yang berarti prioritas kepentingan Amerika Serikat

di atas kewajiban internasional dengan membatasi keterlibatan Amerika dengan organisasi Internasional. Konsep "*America First*" ini bertindak sebagai pernyataan dan sinyal kepada dunia bahwa era globalisasi harus berhadapan dengan sistem perlindungan ekonomi yang dirancang dalam kebijakan-kebijakan Trump. Retorika ini digunakan untuk membangun dukungan politik dengan menampilkan imigrasi sebagai sumber masalah ekonomi dan sosial, serta sebagai justifikasi untuk kebijakan isolasionis dan unilateralisme dalam hubungan luar negeri. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat negara, tak dapat dipungkiri kebijakan ini juga memungkinkan adanya peningkatan perpecahan politik.

Sejak kampanye pemilihan presiden 2016, Trump memperkenalkan konsep atau slogan "*America First: Make America Great Again*," yang menjadi visi utamanya untuk melindungi warga negara dan kepentingan nasional, khususnya dalam isu-isu terkait keamanan nasional seperti imigrasi dan terorisme (Sanjaya, 2017). Slogan ini memiliki makna yang signifikan, di mana Donald Trump menyatakan bahwa itu adalah harapannya untuk mengembalikan kejayaan Amerika Serikat di tingkat global. Slogan ini mencerminkan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi negara, seperti isu hukum, keamanan dan ketertiban di perbatasan, serta tantangan perdagangan. Oleh karena itu, Trump menjadikan "*Make America Great Again*" sebagai dasar dan tujuan dalam kebijakan luar negerinya, dengan janji untuk memperbaiki dan memperkuat politik luar negeri Amerika Serikat selama masa kepemimpinannya (Pappas, 2015)

Dengan pandangannya untuk "*Make America Great Again*", setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2017, Donald Trump dan timnya

mengusung tema "*America First*" dalam kebijakan luar negerinya. "*America First*" berarti bahwa pemerintah akan memprioritaskan kepentingan nasional. Mereka berkomitmen untuk mengembalikan kepemimpinan Amerika Serikat di dunia dan tidak membiarkan pihak lain memanfaatkan negara ini (McMaster & Cohn, 2017). Pada minggu pertama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menandatangani tiga Executive Order yang dianggap sangat kontroversial, menimbulkan pendapat pro dan kontra di masyarakat AS. Executive Order yang berdampak besar terhadap imigran di Amerika Serikat adalah sebagai berikut: (a) Pada 25 Januari 2017, Executive Order mengenai "*Enhancing Public Safety in the Interior of the United States*," yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan publik di dalam negeri (Trump, Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, 2017); (b) Pada 25 Januari 2017, Executive Order tentang "*Border Security and Immigration Enforcement Improvements*," yang berfokus pada keamanan perbatasan dan peningkatan penegakan imigrasi (Trump, Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvements, 2017); Pada 27 Januari 2017, Executive Order mengenai "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*," yang ditujukan untuk melindungi negara dari masuknya teroris asing, yang selanjutnya dikenal sebagai "Larangan tujuh negara" (Trump, Executive Order Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States, 2017). Retorika anti-imigrasi di Amerika Serikat sering kali menjadi cerminan dari kebijakan yang lebih luas dalam konteks identitas dan nasionalisme. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan ketegangan sosial, tetapi juga mendorong kebijakan yang

dapat memperkuat diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Kebijakan "*America First*" yang diusung oleh Donald Trump memperlihatkan fokus pada perlindungan kepentingan nasional, namun sering kali mengabaikan kontribusi positif yang diberikan oleh imigran terhadap masyarakat dan ekonomi. Dalam jangka panjang, penting untuk menyeimbangkan antara kekhawatiran keamanan dengan nilai-nilai inklusivitas dan keragaman yang menjadi fondasi masyarakat Amerika. Dialog yang konstruktif dan kebijakan yang berorientasi pada kolaborasi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

2.1.1 Akar historis kebijakan '*America First*'

Akar historis kebijakan '*America First*' berakar pada tradisi isolasionisme, nasionalisme, dan proteksionisme Amerika Serikat sejak abad ke-19. Konsep ini pertama kali ditegaskan dalam pidato perpisahan George Washington (1796) yang memperingatkan agar Amerika Serikat tidak terlibat dalam konflik internasional, serta Doktrin Monroe (1823) yang menolak campur tangan Eropa di Amerika dan menekankan pemisahan urusan antara dunia lama (Eropa) dan dunia baru (Amerika).

Isolasi geografis memainkan peran kunci, dengan Amerika Serikat yang secara fisik terpisah dari Eropa (pusat politik global abad ke-18 dan ke-19) dan wilayah dunia lainnya, menjadikan non-intervensi dalam urusan luar negeri sebagai kebijakan praktis. Amerika Serikat memiliki wilayah yang luas tetapi hanya memiliki kekuatan militer yang sederhana, sehingga tidak mengejar potensi konflik di luar negeri. Persatuan nasional dan identitas Amerika yang kohesif masih berkembang, membutuhkan fokus yang lebih besar daripada keterlibatan internasional.

Tantangan domestik yang signifikan dalam menyelesaikan dan mengembangkan benua Amerika memberikan pembenaran yang cukup untuk sikap isolasionis. Dalam konteks ini, keputusan Amerika untuk berkonsentrasi pada urusan dalam negeri sepenuhnya logis, terutama untuk negara muda yang perlu fokus pada pembangunan nasional yang komprehensif dan pembangunan institusi. Dalam konteks isolasionisme, Pidato Perpisahan Washington dan Doktrin Monroe berfungsi sebagai panduan penting untuk memahami pendekatan isolasionisme Amerika dalam urusan global. Sementara itu, Trump lebih menekankan pada pengurangan komitmen Amerika Serikat di tingkat internasional, memilih untuk fokus pada pencapaian kepentingan nasional. Dalam hal ini, Trump memprioritaskan empat kepentingan nasional: Pertama, melindungi rakyat, tanah air, dan cara hidup Amerika Serikat; kedua, mempromosikan dan memperjuangkan masyarakat Amerika Serikat; ketiga, menjaga perdamaian melalui kekuatan; keempat, meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di kancah internasional (Wardhana & Dugis, 2019: 148–152).

Salah satu faktor pendorong kebijakan isolasionisme Amerika Serikat adalah adanya perbedaan nilai-nilai demokrasi yang dianut Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Eropa. Arus masuk imigran dari Eropa menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Amerika karena takut nilai-nilai demokrasi mereka akan terkompromikan (McCormick, 2010: 12). Hal ini menjadi latar belakang mengapa slogan "*America First*" yang diusung Trump, yang mirip dengan kebijakan di era Monroe, menjadi manifestasi dari sikap

mengutamakan kepentingan nasional daripada keterlibatan dalam politik internasional.

2.1.2 America First Sebagai Landasan Kebijakan Luar Negeri Amerika

Serikat

"America First" adalah doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menekankan nasionalisme, unilateralisme, proteksionisme, dan kecenderungan isolasionisme. Konsep ini pertama kali muncul antara Perang Dunia I dan II (1918–1939) dan dihidupkan kembali secara signifikan oleh Presiden Donald Trump sejak kampanye pemilihan presiden 2016, serta menjadi dasar utama kebijakan luar negeri selama masa pemerintahannya (2017–2021).

Konsep *"America First"* menjadi fondasi utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Slogan ini menekankan pentingnya kepentingan nasional, di mana pemerintah berfokus pada perlindungan dan promosi kepentingan rakyat Amerika di kancah internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Trump, "Kita tidak akan lagi membiarkan negara lain mengambil keuntungan dari kita" (Trump, 2016). Dengan mengutamakan kebutuhan domestik, Trump berusaha mengembalikan rasa percaya diri dan kemandirian Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan global.

Salah satu aspek penting dari kebijakan *"America First"* adalah unilateralisme. Di bawah doktrin ini, Amerika Serikat cenderung mengambil keputusan secara mandiri, mengabaikan multilateralitas yang sering menjadi dasar hubungan internasional sebelumnya. Hal ini terlihat dalam keputusan untuk menarik diri dari perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Trump

menyatakan, "Kami akan menghentikan pencurian pekerjaan dan kekayaan kami"¹ (Trump, 2017), yang mencerminkan komitmennya untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan global.

Di samping itu, "*America First*" juga mengandung elemen proteksionisme dalam kebijakan perdagangan. Trump menerapkan tarif tinggi pada barang-barang impor untuk melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Ia berpendapat, "Kita harus berdiri untuk pekerja Amerika" (Trump, 2018). Meskipun langkah-langkah ini mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan, mereka juga menghadapi kritik karena dapat memicu perang dagang dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional.

Dengan demikian, "*America First*" bukan sekadar slogan, tetapi menjadi landasan yang membentuk arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama masa pemerintahan Trump. Melalui pendekatan ini, Trump berusaha menegaskan kembali posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan global sambil tetap fokus pada kepentingan rakyatnya. Meskipun strategi ini menuai berbagai reaksi, baik positif maupun negatif, dampaknya akan terus terasa dalam dinamika politik internasional di masa depan.

Dalam implementasinya, "*America First*" mempengaruhi kebijakan di berbagai aspek negara seperti:

1. Penerapan tarif tinggi sebagai upaya melindungi industri domestik dan menekan defisit perdagangan pada aspek ekonomi.

¹ U.S. Departement Of State, "*Remarks by President Trump at APEC CEO Summit*" (<https://2017-2021-translations.state.gov/2017/11/10/remarks-by-president-trump-at-apec-ceo-summit/>, Diakses pada 23 Mei 2025, 15:21)

2. Amerika Serikat meminta sekutunya, seperti Jepang dan negara-negara NATO, untuk meningkatkan kontribusi keuangan mereka dalam aliansi pertahanan. Selain itu, Amerika Serikat juga mengharapkan pengurangan komitmen militer di luar negeri jika tidak dianggap menguntungkan secara langsung bagi negara tersebut.
3. Pembatasan imigrasi, penarikan dari *Paris Agreement*, dan pengurangan peran dalam organisasi internasional mencerminkan orientasi "*inward looking*" dan penolakan terhadap keterlibatan global yang tidak menguntungkan.
4. Di Timur Tengah, kebijakan ini terlihat dalam dukungan kuat terhadap Israel, pendekatan keras terhadap Iran, dan hubungan pragmatis dengan negara-negara Teluk, dengan fokus pada kekuatan dan kesejahteraan nasional, bukan pada perdamaian atau prinsip-prinsip universal.

2.2 Hubungan bilateral Amerika Serikat-Meksiko pada masa transisi kepemimpinan

Sejak awal 1980-an, kebijakan keamanan dan keselamatan publik Amerika Serikat dan Meksiko telah bertransformasi dari pendekatan unilateral yang sering kali saling bertentangan, menjadi visi bersama mengenai keamanan dan penanggulangan kejahatan. Kebijakan ini juga telah berkembang dari respons yang sempit dan bersifat militeristik terhadap tantangan keamanan, menjadi strategi komprehensif yang didasarkan pada pengakuan akan saling ketergantungan dan peluang untuk kolaborasi dalam keamanan. Upaya untuk memperkuat kerjasama keamanan bilateral dan menuju kemitraan keamanan komprehensif dapat dibangun

di atas banyak langkah, kesepakatan, dan kebijakan yang diadopsi bersama oleh Amerika Serikat dan Meksiko sejak 1981. (UCSandiego, 2024)

Hubungan Amerika Serikat-Meksiko mengalami transformasi besar terkait perbatasan dan imigrasi. Pada masa kepemimpinan Barack Obama hubungan mereka cenderung kolaborasi konstruktif dengan fokus pada ekonomi, perdagangan, dan penanggulangan kejahatan transnasional melalui program seperti *High-Level Economic Dialogue* dan *Mérida Initiative*. Obama berupaya mendorong reformasi imigrasi komprehensif walaupun tidak berhasil diloloskan Kongres, sambil menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab migrasi.

Situasi berubah drastis saat kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, dengan pendekatan keras terhadap imigrasi, termasuk rencana pembangunan tembok perbatasan dan kebijakan "*zero tolerance*" bagi imigran tidak berdokumen dari Meksiko. Tuntutan Trump agar Meksiko membiayai tembok perbatasan menciptakan ketegangan diplomatik dan dianggap sebagai penghinaan terhadap hubungan bilateral. Trump juga menggunakan ancaman tarif ekonomi sebagai tekanan agar Meksiko membendung arus migrasi ke Amerika Serikat.

Setelah ini, hubungan bilateral antara Amerika Serikat-Meksiko memasuki babak baru dimana kedua negara mengalami pergantian pemimpin secara bersamaan. Amerika Serikat yang kembali di bawah pimpinan Donald Trump dan Meksiko dengan presiden baru Claudia Sheinbaum. Namun, terkait penanganan arus migrasi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko tetap menjadi isu utama pada hubungan kedua negara ini. Periode peralihan kepemimpinan di kedua negara ini membuka kesempatan untuk memperbaharui hubungan bilateral, walaupun beberapa

ketegangan kemungkinan masih akan terjadi mengenai masalah seperti migrasi dan perdagangan. Diplomasi level tinggi akan sangat penting dalam mengatur hubungan ini, dengan harapan adanya pertemuan yang lebih sering antara pejabat kedua negara dalam beberapa bulan ke depan untuk pembahasan isu-isu yang masih kerap menjadi perdebatan publik.

Namun, hubungan antara Amerika Serikat-Meksiko tetap menjadi salah satu hubungan bilateral yang paling signifikan di kawasan Amerika, dengan dampak yang luas terhadap ekonomi, keamanan, dan stabilitas kawasan. Masa transisi kepemimpinan ini menciptakan peluang bagi Amerika Serikat dan Meksiko untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan bilateral mereka. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan fokus pada isu-isu bersama, kedua negara dapat bekerja sama untuk menghadapi tantangan yang ada dan membangun masa depan yang lebih baik bagi warganya.

2.3 Dinamika Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Amerika Serikat-Meksiko

Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko sejak dahulu menjadi jalan utama beberapa masalah di Amerika Serikat, termasuk terkait migran ilegal. Perbedaan kesejahteraan dan ekonomi antara kedua negara menjadi alasan utama pergerakan migrasi. Kebijakan presiden Amerika Serikat kala itu, Donald Trump, juga membuat situasi yang panas di antara keduanya. Di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan imigrasi yang sangat ketat terkait penegakan imigrasi. Selama empat tahun, Trump mengeluarkan 472 tindakan eksekutif yang berdampak pada kebijakan imigrasi di negara tersebut (Bolter, 2022). Salah satu bentuk kebijakan tegas Trump saat itu yaitu

pembangunan tembok pembatas antara Amerika Serikat-Meksiko. Proyek pembangunan tembok ini sedari awal menuai banyak kritik karena dianggap membuat perpecahan politik di antara Amerika Serikat dan Meksiko. Sebelum masa kepemimpinan Donald Trump, hubungan antara kedua negara ini cukup membaik dalam beberapa sektor termasuk keamanan. Tetapi, selama pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional yang dimaksud oleh Trump berkaitan dengan empat poin yang tercantum dalam strategi keamanan nasional baru Amerika Serikat, yaitu melindungi tanah air, mempromosikan kemakmuran Amerika, menjaga perdamaian melalui kekuatan, dan memperluas pengaruh Amerika (US Embassy & Consulates in Indonesia, Desember 2017). Hal ini juga menjadi pemicu panasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Meksiko pada masa kepemimpinan Trump.

Dinamika kebijakan luar negeri imigrasi antara Amerika Serikat dan Meksiko mencerminkan hubungan yang kompleks dan terus berkembang. Kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan akan tenaga kerja, isu keamanan, dan kondisi sosial-politik di negara asal imigran. Meksiko sering kali berperan sebagai negara transit bagi banyak pencari suaka, sementara Amerika Serikat berusaha menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan pengendalian arus imigrasi. Ketegangan antara kedua negara juga terlihat dalam berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari penegakan hukum yang ketat hingga upaya kolaboratif untuk menangani tantangan migrasi. Dalam konteks ini,

penting bagi kedua negara untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama guna menemukan solusi yang adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

2.3.1 Hubungan Imigrasi Amerika Serikat-Meksiko

Di awal abad ke-20, Amerika Serikat berupaya menarik imigran untuk mendiami lahan-lahan yang belum dimanfaatkan di berbagai negara bagian. Permintaan tenaga kerja yang tinggi di Amerika Serikat menjadi daya tarik bagi warga Meksiko untuk bermigrasi. Mereka mencari peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di Meksiko menjadi pendorong utama migrasi ini. Namun, lonjakan jumlah imigran Meksiko akhirnya mendorong pemerintah Amerika Serikat, melalui Kantor Imigrasi, untuk memberlakukan batasan jumlah imigran yang diizinkan masuk setiap tahunnya. Meksiko juga berupaya mengurangi imigrasi ilegal, dengan menahan 143 imigran gelap dari Honduras, termasuk 71 anak di bawah umur. Sebagai akibat dari situasi ini, Amerika Serikat menghentikan bantuan keuangan kepada tiga negara kecil di Amerika Tengah, yaitu El Salvador, Honduras, dan Guatemala. Keputusan ini diambil karena mereka menilai ketiga negara tersebut gagal mengendalikan angka imigrasi dari wilayah mereka, yang justru memperparah masalah imigrasi di Amerika Serikat (Berty, 2019).

Setelahnya hubungan Amerika Serikat dan Meksiko penuh dengan konflik yang didasari oleh masalah terkait imigrasi. Sengketa perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko merupakan isu kompleks yang belum terselesaikan. Perselisihan ini mendorong Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, untuk mengancam penutupan perbatasan Amerika Serikat-Meksiko jika Meksiko tidak mengatasi

masalah imigran yang ingin masuk ke Amerika Serikat. Trump meyakini bahwa penutupan perbatasan dapat melindungi Amerika Serikat dari imigran, meskipun berpotensi mengganggu arus hubungan perdagangan antara kedua negara.

Hubungan imigrasi antara Amerika Serikat dan Meksiko mencerminkan dinamika yang kompleks dan beragam. Sejak awal abad ke-20, imigrasi Meksiko dipicu oleh kebutuhan tenaga kerja di Amerika Serikat dan kondisi ekonomi yang sulit di Meksiko, seperti yang terlihat selama Revolusi Meksiko dan program Bracero. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah imigran, kebijakan imigrasi Amerika Serikat menjadi lebih ketat, menciptakan ketegangan antara kedua negara. Kebijakan yang berubah-ubah dan retorika politik, terutama di era modern, semakin memperumit hubungan ini. Dengan tantangan yang terus ada, penting bagi kedua negara untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang efektif untuk masalah imigrasi yang saling memengaruhi.

2.3.2 Signifikansi El Paso Sebagai Titik Masuk Imigran dan Pencari Suaka

El Paso merupakan pintu gerbang utama bagi imigran dan pencari suaka yang memasuki Amerika Serikat, terutama mereka yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Kota ini mengalami peningkatan tajam dalam jumlah kedatangan migran, mencapai hingga 2.000 orang setiap harinya. Lokasinya yang strategis di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, berbatasan langsung dengan Ciudad Juárez, menjadikannya titik transit alami bagi mereka yang melakukan perjalanan ke utara. Selain itu, El Paso memiliki infrastruktur yang relatif lebih baik, termasuk jaringan transportasi, tempat penampungan, dan organisasi bantuan, yang menarik para migran untuk mencari dukungan dan sumber daya.

Sejarah panjang El Paso sebagai kota perbatasan dengan koneksi budaya yang kuat di kedua sisi perbatasan juga berkontribusi pada signifikansinya. Rute migrasi yang mapan, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kekerasan, dan bencana alam di negara asal para migran, melewati kota ini. Meskipun El Paso memiliki kapasitas pemrosesan imigran, kedatangan migran yang tinggi dapat membebani sistem dan menyebabkan penundaan.

Kedatangan migran memiliki dampak yang signifikan bagi El Paso, baik positif maupun negatif. Mereka dapat berkontribusi pada tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membebani sumber daya lokal dan layanan sosial. Selain itu, El Paso menghadapi tantangan kemanusiaan dalam menyediakan tempat penampungan, makanan, perawatan medis, dan bantuan hukum kepada para migran, terutama mereka yang melarikan diri dari kekerasan dan kemiskinan. Signifikansi El Paso sebagai titik masuk migran menjadikannya pusat perdebatan dan kebijakan imigrasi, dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat berdampak signifikan pada kota dan komunitas migran yang melewatinya.

Secara politis, El Paso juga menjadi medan pertikaian antara pemerintah federal dan negara bagian Texas terkait kebijakan penanganan imigran ilegal, termasuk penerapan undang-undang yang memungkinkan penangkapan dan deportasi oleh pejabat negara bagian. Meskipun ada tembok perbatasan, hal ini tidak mengurangi jumlah pencari suaka yang terus berdatangan ke El Paso untuk mencoba masuk ke Amerika Serikat.



Sumber: solasproject.com

Pada peta di atas, terdapat dua titik yang berada di wilayah Perbatasan El Paso dan Ciudad Juárez. Titik tersebut menandakan bahwa pada wilayah tersebut yang menjadi Kawasan para migran yang ingin memasuki Amerika Serikat dari arah Meksiko.

2.4 Kebijakan Imigrasi Era Trump Pertama (2017-2021): Fondasi "America First"

Implementasi kebijakan imigrasi ini tidak luput dari tantangan dan kontroversi. Meskipun sebagian besar berhasil mengurangi angka penyeberangan ilegal secara statistik, kebijakan-kebijakan ini menghadapi kritik keras dari kelompok hak asasi manusia dan organisasi pro-imigran yang menilai pendekatan tersebut terlalu keras dan tidak manusiawi. Dengan menegakkan hukum imigrasi Amerika, Presiden Trump membuat kemajuan besar dalam mengakhiri krisis kemanusiaan di perbatasan, mencegah masuknya penjahat, teroris, dan narkoba ke negara kita, serta melindungi pekerja dan pembayar pajak Amerika dari kehilangan pekerjaan dan penyalahgunaan sistem kesejahteraan. Kebijakan periode pertama ini kemudian menjadi fondasi bagi strategi imigrasi yang lebih agresif pada masa pemerintahan keduanya yang dimulai pada 2025.

2.4.1 Implementasi Executive Order 13767: "*Border Security and Immigration Enforcement Improvements*"

Implementasi Executive Order 13767 yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada 25 Januari 2017 menandai transformasi fundamental dalam pendekatan keamanan perbatasan Amerika Serikat, khususnya di wilayah El Paso yang menjadi salah satu koridor perbatasan tersibuk antara Amerika Serikat dan Meksiko. Perintah eksekutif ini mengamanatkan pembangunan tembok perbatasan fisik yang komprehensif, peningkatan jumlah personel Border Patrol, dan penguatan teknologi pengawasan di sepanjang perbatasan selatan Amerika Serikat. Di El Paso, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan unik mengingat wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang kompleks dengan Rio Grande sebagai pembatas alami, serta tingkat aktivitas perdagangan lintas batas yang tinggi melalui Bridge of the Americas dan Paso del Norte Bridge. Konstruksi tembok perbatasan di El Paso melibatkan pembangunan struktur baja setinggi 18-30 kaki yang menggantikan pagar lama yang dianggap tidak memadai, dengan total investasi mencapai ratusan juta dollar untuk segmen El Paso saja. Penambahan personel CBP (Customs and Border Protection) dan Border Patrol di sektor El Paso meningkat signifikan, dari sekitar 2.500 agen pada tahun 2016 menjadi lebih dari 3.200 agen pada tahun 2020, disertai dengan penggunaan teknologi canggih seperti sensor gerak, kamera thermal, dan sistem radar untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap aktivitas ilegal. Implementasi kebijakan ini juga mencakup program "Remain in Mexico" atau Migrant Protection Protocols (MPP) yang mengharuskan pencari suaka untuk menunggu proses pengadilan imigrasi mereka

di Meksiko, dengan El Paso menjadi salah satu port of entry utama untuk program ini. Dampak implementasi Executive Order 13767 di El Paso terlihat dari penurunan statistik penangkapan ilegal border crossing dari 25.193 kasus pada tahun 2016 menjadi 15.678 kasus pada tahun 2020, meskipun data ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi dan pandemi COVID-19. Namun, implementasi kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi dan tantangan, termasuk dampak terhadap komunitas lokal El Paso yang memiliki hubungan ekonomi dan sosial yang erat dengan Ciudad Juárez di sisi Meksiko, serta keprihatinan dari kelompok advokasi hak asasi manusia terkait kondisi para migran yang terdampar di perbatasan. Periode kepemimpinan Trump II (2025-sekarang) menunjukkan kontinuitas dan intensifikasi implementasi Executive Order 13767, dengan pengalokasian dana tambahan untuk penyelesaian konstruksi tembok perbatasan di segmen-segmen yang belum terselesaikan selama periode sebelumnya, serta peningkatan koordinasi antara berbagai agensi federal dalam operasi penegakan keamanan perbatasan di El Paso yang menjadi model bagi implementasi di sektor perbatasan lainnya.

2.4.2 Kebijakan "*Zero Tolerance*" dan Pemisahan Keluarga

Kebijakan "*Zero Tolerance*" yang diumumkan oleh Jaksa Agung Jeff Sessions pada Mei 2018 merupakan salah satu aspek paling kontroversial dari kebijakan imigrasi pada kepemimpinan Trump yang memberikan dampak signifikan di perbatasan El Paso. Kebijakan ini mengamanatkan bahwa semua migran yang melintasi perbatasan tanpa izin, termasuk mereka yang mencari suaka, akan dirujuk ke Departemen Kehakiman untuk penuntutan pidana. Konsekuensi langsung dari

kebijakan ini adalah pemisahan paksa antara orang tua dan anak-anak, karena sistem peradilan pidana tidak mengizinkan anak-anak untuk ditempatkan dalam fasilitas penahanan dewasa bersama orang tua mereka yang sedang menjalani proses hukum.

Sektor El Paso menjadi salah satu lokasi utama untuk kebijakan pemisahan keluarga ini sebelum implementasi resmi kebijakan "*Zero Tolerance*" secara nasional. Berdasarkan laporan dari Border Patrol, dari total 1.800 anggota keluarga yang diproses dalam program di sektor El Paso, sekitar 281 orang mengalami pemisahan dari keluarganya. "Eksperimen" ini kemudian digunakan oleh ICE, CBP, dan CIS sebagai dasar untuk meluncurkan program *zero tolerance* di seluruh perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, menjadikan El Paso sebagai laboratorium uji coba untuk kebijakan yang nantinya akan berdampak pada ribuan keluarga migran.

Implementasi kebijakan ini di El Paso dan sektor perbatasan lainnya mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam bagi keluarga-keluarga migran. Data menunjukkan bahwa setidaknya 2.342 anak dipisahkan dari orang tua mereka setelah ditangkap melintasi perbatasan secara ilegal sejak 5 Mei 2018, ketika kebijakan "*zero tolerance*" pada kepemimpinan Trump mulai berlaku². Namun, investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih besar, dengan lebih dari 5.000 anak yang dipisahkan dari orang tua mereka tanpa proses pelacakan atau catatan yang memadai untuk memungkinkan reunifikasi. Demografis anak-anak yang terpisah menunjukkan bahwa hampir 60% adalah

² Stef W. Kight, "*DHS never had technology needed to track separated migrant kids*", *axios*, 27 November, 2019, https://www.axios.com/2019/11/27/family-separation-dhs-inspector-general?utm_source

warga Guatemala (2.270 anak), diikuti oleh Honduras (1.150), El Salvador (281), Meksiko (75), Brasil (74), dan Rumania (23).

Kebijakan pemisahan keluarga ini tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga menghadirkan tantangan operasional dan hukum yang kompleks. Pemerintah federal tidak memiliki sistem yang memadai untuk melacak hubungan keluarga atau memfasilitasi reunifikasi, yang mengakibatkan banyak keluarga terpisah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak orang tua dideportasi sementara anak-anak mereka tetap berada di fasilitas penahanan atau ditempatkan dalam sistem asuh. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini masih dirasakan hingga saat ini, dengan hampir 1.000 anak migran yang dipisahkan pada era Trump belum berhasil bersatu kembali dengan orang tua mereka meskipun telah ada upaya reunifikasi selama dua tahun di bawah Administrasi Biden.

Kontroversi kebijakan "*Zero Tolerance*" di El Paso dan perbatasan AS-Meksiko lainnya akhirnya memicu kritik internasional dan domestik yang luas, termasuk dari organisasi hak asasi manusia, tokoh politik lintas partai, dan masyarakat sipil. Tekanan publik dan tantangan hukum yang berkelanjutan memaksa kepemimpinan Trump untuk mengakhiri kebijakan pemisahan keluarga melalui Executive Order pada Juni 2018, meskipun dampak dari kebijakan tersebut terus berlanjut. Pada tahun 2023, pemerintah federal mencapai kesepakatan penyelesaian yang melarang kebijakan di masa depan menggunakan pemisahan keluarga sebagai kebijakan luas hingga tahun 2031, serta memberikan jalur legal bagi imigran yang terdampak untuk tinggal di negara tersebut dengan izin kerja dan manfaat lainnya.

2.4.3 Protokol "*Remain in Mexico*" (*Migrant Protection Protocols*)

Protokol "*Remain in Mexico*" atau yang secara resmi dikenal sebagai Migrant Protection Protocols (MPP) merupakan salah satu kebijakan imigrasi paling kontroversial yang diimplementasikan oleh pemerintahan Donald Trump pada Januari 2019. Kebijakan ini secara mendasar mengubah sistem penanganan pencari suaka di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, khususnya di wilayah El Paso yang menjadi salah satu titik perbatasan tersibuk. Implementasi MPP di El Paso dimulai pada Maret 2019, menandai perluasan kebijakan yang awalnya diterapkan di San Diego. Kebijakan ini mengharuskan individu yang tiba di perbatasan selatan dan mengajukan permohonan suaka untuk diberikan pemberitahuan untuk hadir di pengadilan imigrasi namun dikirim kembali ke Meksiko untuk menunggu proses persidangan mereka.

Implementasi MPP di El Paso mencerminkan pendekatan yang lebih ketat terhadap penanganan migrasi, dimana *Department of Homeland Security* (DHS) berupaya mengurangi jumlah pencari suaka yang diizinkan menunggu di dalam wilayah Amerika Serikat selama proses hukum berlangsung. Pemerintahan Trump berargumen bahwa kebijakan ini akan mengurangi jumlah orang asing yang memanfaatkan hukum Amerika Serikat dan mencegah klaim suaka palsu, serta memastikan bahwa migran tidak akan diizinkan untuk menghilang ke dalam Amerika Serikat sebelum pengadilan mengeluarkan keputusan akhir tentang apakah mereka akan diterima dan diberikan perlindungan di bawah hukum Amerika Serikat. Dalam konteks El Paso, implementasi kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan mengingat geografis wilayah ini yang berbatasan langsung dengan

Ciudad Juárez, salah satu kota perbatasan Meksiko yang menghadapi tantangan keamanan kompleks.

Data menunjukkan bahwa sejak program dimulai hingga April 2020, lebih dari 64.000 pencari suaka telah dikembalikan ke Meksiko sebagai bagian dari program MPP. Khusus untuk wilayah El Paso, implementasi kebijakan ini menghasilkan penurunan yang signifikan dalam jumlah pertemuan dengan migran, dengan pemerintahan Trump melaporkan bahwa sejak puncak krisis pada Mei 2019, jumlah orang asing yang ditemukan di dan antara port of entry telah menurun sebesar 64% secara keseluruhan dan sekitar 80% untuk keluarga Amerika Tengah. Namun, implementasi MPP di El Paso juga menghadapi kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebijakan ini memaksa pencari suaka untuk menghadapi bulan atau bahkan tahun dalam kondisi berbahaya, miskin, dan masalah kesehatan sembari menunggu proses persidangan mereka di kota-kota perbatasan Meksiko yang seringkali tidak aman.

Dampak kebijakan MPP terhadap dinamika perbatasan El Paso juga terlihat dari statistik yang menunjukkan bahwa satu dari tiga migran yang dimasukkan ke dalam program tersebut ditangkap kembali oleh Border Patrol setelah menyeberang lagi, menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah upaya penyeberangan berulang. Kebijakan ini juga menimbulkan kompleksitas diplomatik antara Amerika Serikat dan Meksiko, dimana pemerintah Meksiko harus menampung ribuan pencari suaka di wilayah perbatasannya, termasuk di Ciudad Juárez yang berseberangan dengan El Paso.

2.5 Kebijakan Imigrasi Era Trump Kedua (2025-Sekarang): Kontinuitas dan Intensifikasi

Era kepemimpinan Donald Trump kedua yang dimulai pada 20 Januari 2025 menandai fase baru dalam evolusi kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang dicirikan oleh kontinuitas sekaligus intensifikasi dramatis dari pendekatan yang telah dibangun selama periode pertama (2017-2021). Berbeda dengan masa transisi kepemimpinan sebelumnya, Trump memulai masa jabat keduanya dengan serangkaian tindakan eksekutif yang langsung mengubah lanskap sistem imigrasi nasional dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagaimana dinyatakan dalam *Executive Order "Protecting the American People Against Invasion"* yang ditandatangani pada hari pertama masa jabatnya, Trump mendeklarasikan bahwa "selama 4 tahun terakhir, pemerintahan sebelumnya mengundang, mengelola, dan mengawasi banjir imigrasi ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Amerika Serikat" (The White House, 2025). Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya melanjutkan agenda anti-imigrasi yang telah menjadi ciri khasnya, tetapi juga mengintensifkan pendekatan tersebut melalui mobilisasi sumber daya militer dan penegakan hukum yang lebih masif, khususnya di wilayah perbatasan strategis seperti El Paso.

Salah satu aspek paling signifikan dari kebijakan imigrasi era Trump kedua adalah militarisasi perbatasan selatan dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat. Administrasi Trump telah menciptakan apa yang disebutnya sebagai "zona militer" di sepanjang perbatasan, dengan The Texas Tribune melaporkan bahwa "Ini adalah zona militer kedua yang dibuat oleh

pemerintahan Trump di perbatasan, setelah zona militer di perbatasan New Mexico-Meksiko" (Texas Tribune, 2025). Khususnya di wilayah El Paso, yang telah menjadi salah satu titik paling strategis dalam dinamika imigrasi Amerika Serikat, kehadiran militer ini menghadirkan transformasi fundamental dalam pendekatan keamanan perbatasan. Mobilisasi ini tidak hanya mencakup personel militer, tetapi juga melibatkan kendaraan tempur dan teknologi militer tingkat tinggi yang berpatroli di wilayah perbatasan, menciptakan pemandangan yang lebih menyerupai zona konflik ketimbang perbatasan sipil. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari model penegakan sipil tradisional menuju model militer yang lebih agresif dan intimidatif.

Kontinuitas kebijakan era Trump pertama terlihat jelas dalam reimplementasi berbagai program yang telah menjadi ciri khas administrasi sebelumnya, termasuk program *"Remain in Mexico"* atau *Migrant Protection Protocols (MPP)*, yang kembali diberlakukan dalam hari-hari pertama administrasi kedua. Namun, intensifikasi kebijakan ini tercermin dalam ruang lingkup yang lebih luas dan implementasi yang lebih ketat. Dalam Executive Order yang sama, Trump menekankan bahwa "rakyat Amerika berhak mendapatkan Pemerintah Federal yang mengutamakan kepentingan mereka dan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mencapai penegakan hukum secara total dan efisien, termasuk melalui insentif yang sah dan kemampuan penahanan" (The White House, 2025). Pendekatan ini telah menyebabkan perubahan dramatis dalam pola migrasi dan penanganan pencari suaka di perbatasan selatan, dengan dampak yang paling terasa di wilayah El Paso yang telah menjadi titik fokus utama kebijakan baru ini.

2.5.1 Revitalisasi Border Wall Construction dan Teknologi Surveillance

Revitalisasi pembangunan tembok perbatasan (*border wall construction*) menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi kebijakan imigrasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, dengan implementasi yang sangat signifikan terlihat di wilayah El Paso Border sebagai studi kasus yang representatif. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan pendekatan fisik dalam penguatan keamanan perbatasan, tetapi juga mengintegrasikan teknologi *surveillance* canggih yang mengubah paradigma pengawasan perbatasan dari sistem konvensional menuju era digital yang lebih sophisticated. Dalam konteks El Paso, yang merupakan salah satu titik crossing terbesar antara Amerika Serikat dan Meksiko, revitalisasi ini melibatkan pembangunan struktur fisik berupa steel bollard fencing yang menggantikan sistem pagar lama, dilengkapi dengan *concrete foundation* yang dapat mencapai kedalaman hingga 6 kaki untuk mencegah *tunneling activities*. Pembangunan tembok perbatasan direncanakan sepanjang 69 miles (111 km) di dekat El Paso, Texas, dengan biaya yang dilaporkan mencapai \$12.5 juta per mil (\$7.8 juta per kilometer) (Wikipedia, 2024). Teknologi *surveillance* yang diimplementasikan mencakup sistem sensor terintegrasi, kamera pencitraan termal, peralatan pendeteksi seismik, dan unmanned aerial vehicles (UAVs) yang beroperasi setiap waktu untuk memberikan kemampuan pemantauan waktu secara nyata kepada *Border Patrol agents*. Menara-menara pengawasan dilengkapi dengan kamera jarak jauh, radar, dan laser illuminators yang menghasilkan gambar dan data lain yang diproses oleh algoritma agensi untuk mengidentifikasi orang dan objek (MIT Technology Review, 2023). Sistem ini juga dilengkapi dengan *artificial*

intelligence-powered analytics yang mampu membedakan antara pergerakan manusia, aktivitas kendaraan, dan migrasi satwa liar, sehingga mengurangi peringatan palsu dan meningkatkan efisiensi operasional. Menara-menara bertenaga surya ini, yang dilengkapi dengan sensor jarak jauh canggih, termasuk teknologi termal malam hari, menawarkan pengawasan real-time dan meningkatkan kemampuan agen untuk merespons dengan cepat aktivitas perbatasan (U.S. Customs and Border Protection, 2024). U.S. Customs and Border Protection telah menggunakan sekitar 175 menara pengawasan di sepanjang perbatasan selatan (The Washington Post, 2022). Biaya pelaksanaan untuk revitalisasi ini mencapai miliaran dollar, dengan alokasi khusus untuk sektor El Paso yang mencerminkan prioritas strategis wilayah tersebut dalam kerangka kerja keamanan perbatasan secara keseluruhan. Data menunjukkan pengurangan penangkapan sebesar 70% dalam jangka waktu yang sama di zona-zona tertentu (Department of Homeland Security, 2020). Dampak dari revitalisasi ini terhadap migration patterns sangat signifikan, dengan data menunjukkan pergeseran rute migrasi ilegal dari areas dengan peningkatan hambatan fisik dan pengawasan teknologi menuju wilayah-wilayah yang dianggap lebih rentan, fenomena yang dikenal sebagai *balloon effect* dalam *border security studies*. Kontroversi di sekitar pembangunan tembok perbatasan tidak hanya melibatkan aspek masalah kemanusiaan, tetapi juga penilaian dampak lingkungan, masalah hak milik, dan hubungan diplomatik dengan Mexico, yang secara keseluruhan menciptakan kompleksitas dinamika politik yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan dan efektivitas operasional dari kebijakan tersebut. Department of Homeland Security menggunakan teknologi yang tersedia

secara komersial seperti sistem pengawasan video tetap dan bergerak, pencari jarak, perangkat pencitraan termal, radar, sensor tanah, dan sensor frekuensi radio (Department of Homeland Security, 2024). Industri perbatasan dan pengawasan yang sudah bernilai miliaran dollar diperkirakan akan mendapat keuntungan besar di bawah rencana Trump untuk pengeluaran penegakan perbatasan baru, pengawasan imigrasi, dan deportasi massal (Bulletin of the Atomic Scientists, 2025). Integrasi teknologi dalam *border wall construction* di El Paso juga mencakup sistem identifikasi biometrik, pengenalan plat nomor otomatis, dan jaringan komunikasi yang terhubung dengan database nasional, menciptakan kemampuan berbagi informasi yang komprehensif antara berbagai lembaga dan yurisdiksi yang terlibat dalam kegiatan penegakan perbatasan.

2.5.2 "Operation Aurora": Mass Deportation Program

"Operation Aurora" merupakan program deportasi massal yang menjadi salah satu kebijakan imigrasi paling kontroversial pada masa kepemimpinan Donald Trump II yang dimulai sejak Januari 2025. Program ini dinamai sesuai dengan nama kota Aurora, Colorado, yang menjadi fokus retorika anti-imigran Trump selama kampanye pemilihan presiden 2024. Penamaan ini sendiri menuai kritik karena dianggap kejam karena menggunakan nama komunitas yang justru akan paling terdampak oleh kebijakan tersebut. Operation Aurora dirancang sebagai operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, dengan target mendeportasi hingga 25 juta orang dari wilayah Amerika Serikat menggunakan kekuatan Garda Nasional dan militer. Program ini mendasarkan otoritas hukumnya *pada Alien Enemies Act* tahun 1798, sebuah undang-undang yang memberikan presiden

kekuasaan luas untuk menahan dan memindahkan warga negara asing, terutama dalam situasi darurat nasional.

Implementasi *Operation Aurora* di wilayah perbatasan El Paso menunjukkan karakteristik operasional yang intensif dan sistematis. El Paso, sebagai salah satu titik perbatasan tersibuk antara AS-Meksiko, menjadi lokasi strategis untuk pelaksanaan program deportasi massal ini. Fasilitas penahanan sementara berbentuk tenda didirikan di wilayah timur laut El Paso untuk menampung ribuan imigran yang menunggu proses deportasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 5.500 orang yang berada dalam tahanan CBP (Customs and Border Protection), sebagian besar di wilayah El Paso dan San Diego, menghadapi deportasi cepat setelah penyeberangan perbatasan AS-Meksiko baru-baru ini. Pemerintahan Trump mengklaim telah menangkap lebih dari 150.000 imigran ilegal dan mendeportasi lebih dari 139.000 orang dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, dengan hanya melepaskan sembilan imigran ilegal ke AS sebuah penurunan 99,99% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di bawah pemerintahan Biden.

Aspek operasional *Operation Aurora* melibatkan kerjasama intensif antara berbagai agensi federal, termasuk ICE (*Immigration and Customs Enforcement*), CBP, dan Departemen Pertahanan. Program ini mengalokasikan anggaran sebesar \$14,4 miliar dari total \$75 miliar untuk operasi transportasi dan pemindahan ICE, dengan target mendukung deportasi hingga 1 juta orang per tahun. Strategi yang digunakan tidak hanya berfokus pada penangkapan dan deportasi fisik, tetapi juga menciptakan atmosfer ketakutan dan teror di komunitas imigran untuk mendorong self-deportation - praktik yang mengingatkan pada *Operation Wetback* tahun 1950-

an di Texas. Penggunaan fasilitas penahanan tenda swasta, seperti yang dioperasikan oleh perusahaan Deployed Resources di El Paso, menunjukkan skala industrialisasi dari program deportasi ini. Dampak sosial dari Operation Aurora sangat signifikan, mengingat diperkirakan lebih dari 16,7 juta orang di tingkat nasional memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang tinggal bersama mereka yang berpotensi terkena dampak deportasi massal, sehingga menimbulkan separasi keluarga dan efek traumatis yang mendalam bagi komunitas-komunitas terdampak, terutama di wilayah perbatasan seperti El Paso yang menjadi garda terdepan implementasi kebijakan imigrasi yang keras ini.

2.5.3 Reformulasi Title 42 dan *Emergency Border Declarations* dalam Kebijakan Imigrasi Trump

Reformulasi Title 42 dan deklarasi darurat perbatasan merupakan dua instrumen kebijakan utama yang telah menjadi ciri khas pendekatan Donald Trump dalam menangani isu imigrasi di perbatasan selatan Amerika Serikat, khususnya di kawasan El Paso yang menjadi salah satu koridor utama migrasi dari Meksiko. Title 42, yang secara historis merupakan klausul dari Undang-Undang Layanan Kesehatan Masyarakat tahun 1944, pada awalnya jarang digunakan selama beberapa dekade terakhir hingga akhirnya diaktifkan kembali oleh administrasi Trump pertama pada Maret 2020 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah masuknya individu selama keadaan darurat kesehatan masyarakat tertentu, yang dalam konteks ini digunakan untuk mengusir migran secara langsung tanpa proses pemeriksaan suaka yang biasa dilakukan. Selama periode implementasinya dari

Maret 2020 hingga Mei 2023, " Data dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat hampir 3 juta pengusiran di perbatasan Barat Daya di bawah otoritas Title 42 " (KFF, 2025), dengan " Pemerintahan Trump mengusir 69% keluarga migran yang memasuki tahanan perbatasan AS antara Maret 2020 dan Januari 2021" (CBS News, 2023). Statistik menunjukkan bahwa dalam tahun fiskal 2022, "Lebih dari 1 juta dari pertemuan dengan para migran tersebut mengakibatkan mereka diusir berdasarkan Title 42" (CBS News, 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini dalam menghentikan migrasi tidak sah menjadi perdebatan, karena meskipun digambarkan secara ideal oleh beberapa politisi, " banyak dari pengusiran tersebut adalah orang-orang yang sama yang berulang kali mencoba menyeberangi perbatasan " (KFF, 2025), yang justru menciptakan siklus deportasi berulang yang memungkinkan migran untuk kembali mencoba menyeberang berkali-kali.

Dalam masa kepemimpinannya yang kedua, Trump telah menunjukkan komitmen untuk menghidupkan kembali kebijakan Title 42 melalui dokumen-dokumen perencanaan yang mengindikasikan keinginan untuk merevitalisasi ukuran perbatasan yang memungkinkan pengusiran ringkas migran. Hal ini sejalan dengan strategi komprehensif administrasi Trump dalam membatasi imigrasi melalui perlindungan kesehatan masyarakat, meskipun pengalaman selama COVID-19 menunjukkan dampak yang kompleks dan seringkali kontroversial dari implementasi kebijakan tersebut. Sementara itu, deklarasi darurat perbatasan nasional yang diumumkan oleh Trump melalui perintah eksekutif pada 20 Januari 2025, segera setelah pelantikannya, menandai kelanjutan dari pendekatan yang

telah digunakan sebelumnya pada 15 Februari 2019 selama masa kepemimpinannya yang pertama. Dalam proklamasi resminya, Trump menyatakan: "I, DONALD J. TRUMP... hereby declare that a national emergency exists at the southern border of the United States" (White House, 2025), dengan pernyataan bahwa "America's sovereignty is under attack" (KPBS, 2025). Deklarasi darurat ini, yang mengutip National Emergencies Act, memberikan kewenangan kepada Sekretaris Pertahanan untuk memindahkan dana dalam departemen guna mendanai pembangunan tembok perbatasan, serta mengotorisasi pemanggilan reservis untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam aktivitas perbatasan. Implementasi kebijakan ini telah terlihat secara konkret dengan *"Active-duty military arrived Thursday"* (KPBS, 2025) di berbagai lokasi termasuk San Diego dan El Paso, Texas, yang menunjukkan keseriusan administrasi dalam mengatasi apa yang mereka anggap sebagai krisis perbatasan. Dalam pernyataan resminya, Trump menegaskan filosofi kebijakannya: "Sebagai Presiden Amerika Serikat, tugas tertinggi saya adalah membela negara dan warganya. Sebuah negara tanpa perbatasan bukanlah sebuah negara sama sekali" (White House Archives).

Khususnya di El Paso, yang telah menjadi titik fokus dalam dinamika migrasi perbatasan selatan, implementasi kedua kebijakan ini memiliki implikasi yang sangat signifikan. El Paso, sebagai salah satu kota perbatasan tersibuk di Amerika Serikat, telah mengalami fluktuasi dramatis dalam jumlah penyeberangan migran dan telah menjadi laboratorium alami untuk berbagai eksperimen kebijakan imigrasi. Reformulasi Title 42 dan deklarasi darurat perbatasan di kawasan ini tidak hanya berdampak pada aspek operasional penanganan migran, tetapi juga

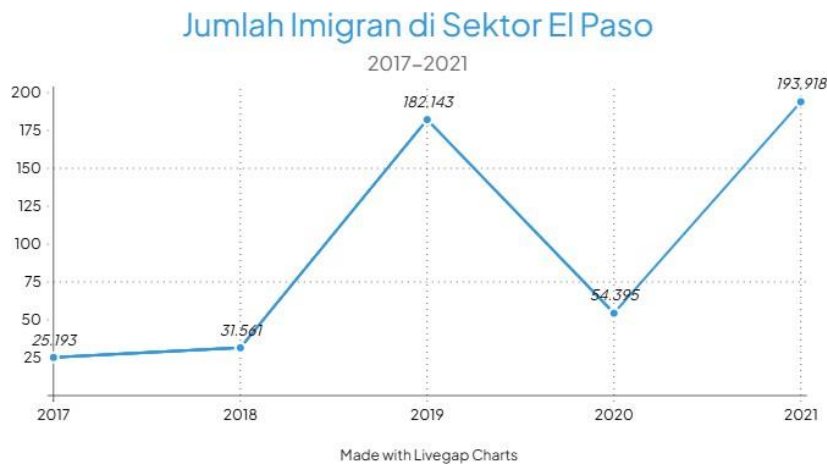
mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik lokal. Deklarasi darurat yang memungkinkan mobilisasi sumber daya militer dan federal secara masif ke El Paso menunjukkan transformasi pendekatan dari penanganan sipil menuju militarisasi perbatasan yang lebih eksplisit. Namun, kritik terhadap kedua kebijakan ini juga bermunculan, dengan berbagai pihak menganggap deklarasi darurat sebagai penyalahgunaan kekuasaan, terutama mengingat kondisi perbatasan yang relatif tenang dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya yang mengalami gejolak besar. Seperti yang dilaporkan oleh KPBS, "Deklarasi darurat perbatasan oleh Trump terjadi pada saat yang relatif tenang setelah bertahun-tahun mengalami kekacauan besar" (KPBS, 2025). Kritik juga datang dari perspektif hukum, dengan Brennan Center for Justice menyebut kebijakan ini sebagai "Deklarasi Darurat Trump di Perbatasan adalah Penyalahgunaan Kekuasaan" (Brennan Center, 2025). Kontroversi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa meskipun Title 42 telah berakhir secara resmi pada Mei 2023, upaya untuk menghidupkannya kembali menunjukkan kontinuitas ideologis dalam pendekatan Trump terhadap imigrasi yang cenderung mengutamakan pembatasan dan pengendalian ketat, bahkan ketika kondisi yang mendasari kebijakan tersebut telah berubah secara fundamental. Dalam konteks ini, pengacara ACLU Lee Gelernt mengkritik implementasi Title 42 dengan menyatakan: "Siapa pun yang tiba di perbatasan kami seharusnya dapat mencari suaka jika mereka mengaku takut akan penganiayaan " (ABC News, 2022), menekankan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum imigrasi internasional.

2.6 Perkembangan Migran Pada Masa Kepemimpinan Trump

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki jumlah imigran lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (López et al., 2017:1). Pada masa kepemimpinan Donald Trump, dinamika imigrasi Amerika Serikat mengalami perubahan cukup signifikan. Kebijakan luar negeri imigrasi Amerika Serikat yang dibuat oleh Trump bertujuan untuk memperketat masuknya migran ilegal tak berdokumen resmi. Jumlah imigran ilegal di Amerika Serikat mengalami fluktuasi antara tahun 2016 dan 2022, menurut laporan dari *Department of Homeland Security (DHS)* dan *Center for Immigration Studies (CIS)*. Setelah mencapai 11,75 juta pada tahun 2016, jumlah tersebut sempat menurun hingga 11,39 juta pada tahun 2018. Namun, angka ini kembali naik menjadi 11,48 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 10,22 juta, kemungkinan disebabkan oleh pandemi dan pembatasan perjalanan. Peningkatan signifikan kembali terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah imigran ilegal mencapai 11,35 juta.

Berdasarkan data tahun 2017, Amerika Serikat menduduki posisi tertinggi sebagai negara dengan populasi imigran terbesar di dunia (López, 2017). Menurut laporan PBB, total imigran di Amerika Serikat mencapai 44,4 juta orang, yang merepresentasikan 13,6% dari keseluruhan populasi negara tersebut. Dari total tersebut, 77% imigran masuk melalui jalur legal, sementara 23% lainnya masuk secara ilegal (Radford, 2019). Perhatian terhadap isu imigrasi meningkat signifikan setelah diimplementasikannya kebijakan *War on Terror* sebagai tanggapan atas tragedi 9/11. Kebijakan ini tidak hanya berdampak negatif pada komunitas imigran

Muslim, tetapi juga memengaruhi seluruh populasi imigran di Amerika Serikat (A. Ewing et al., 2015)



Meskipun pada data PBB menunjukkan bahwa total imigran mencapai 44,4 juta orang, pada grafik dari data *U.S. Customs and Border Protection (CBP)* menunjukkan lonjakan imigran yang terjadi pada tahun 2019-2021 dimana data tertinggi hanya mencapai 193.918 jiwa.

2.5.1 Krisis Kemanusiaan di Perbatasan

Krisis kemanusiaan yang terjadi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko terjadi karena gelombang migrasi dari Amerika Tengah yang berusaha masuk ke Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat memperketat arus migrasi dengan mengerahkan pengawasan militer yang. Selain dengan pengawasan militer, Trump membuat kebijakan “*Remain in Mexico*” atau secara resmi dikenal dengan *Migrant Protection Protocols (MPP)*. Kebijakan ini mengharuskan para pencari suaka untuk tetap berdiam di Meksiko hingga pengadilan imigrasi mereka selesai. Prosesnya yaitu begitu migran tiba di tempat itu, mereka diproses dan diambil sidik jari mereka. Pihak berwenang kemudian

melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap migran untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Pusat itu memiliki keamanan yang ketat selama 24 jam. Para migran dikelompokkan dalam ruangan yang diawasi secara ketat berdasarkan jenis kelamin dan keluarga sampai pihak berwenang menentukan langkah selanjutnya untuk setiap orang (CBP Claudio Herrera, 2024). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah klaim suaka yang tidak sah dan mengurangi backlog pengadilan imigrasi. Para pejabat setempat juga berusaha untuk memastikan semua orang diperlakukan secara bermartabat (Leeser, 2022). Namun, para pencari suaka yang dikembalikan ke Meksiko sering menghadapi kondisi yang berbahaya dan tidak stabil. Mereka rentan terhadap kekerasan, penculikan, pemerasan, dan pelecehan oleh kelompok kriminal. Banyak dari mereka tinggal di tempat penampungan yang penuh sesak atau di jalanan, dengan akses terbatas ke makanan, air, perawatan medis, dan tempat tinggal yang layak. Meskipun kebijakan *"Remain in Mexico"* telah diakhiri pada masa kepemimpinan Joe Biden melalui Mahkamah Agung, dampaknya masih terasa, dan perdebatan tentang kebijakan imigrasi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko terus berlanjut.